

## **KEHADIRAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA RUPS SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

Bning Samudera Hakim<sup>1</sup>, Hariyanto<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kehadiran dan pengaturan formalitas notaris dalam pembuatan akta RUPS secara elektronik yang dilakukan di Kabupaten Sleman serta implementasi pelaksanaannya, berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, gabungan antara 2 jenis model penelitian yang mana penelitian ini mengkaji peraturan, pelaksanaan, dan implementasi ketentuan hukum positif secara faktual yang terjadi di masyarakat. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian secara langsung atau penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder.

Hasil dari penelitian, pengaturan secara tertulis mengenai kehadiran notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik untuk perseroan tertutup belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Implementasi sistem pelaksanaan RUPS secara elektronik di Kabupaten Sleman belum ada peraturan dari organisasi ataupun majelis pengawas mengenai hal pelaksanaan RUPS secara elektronik. Supaya tidak bertentangan dengan hukum maka perseroan dapat melakukan keputusan sirkuler atau membuat akta pernyataan rapat. Dari segi pelaksanaan memang RUPS secara elektronik memudahkan bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya, namun akan lebih tepat lagi jika dibarengi dengan regulasi yang jelas dan tepat supaya tidak bertentangan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Notaris, Elektronik.**

---

<sup>1</sup> Srontakan, Argomulyo, Bantul, D.I Yogyakarta

<sup>2</sup> Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta

## **THE PRESENCE OF A NOTARY IN THE MAKING OF THE DEED OF RUPS ELECTRONICALLY IN SLEMAN DISTRICT**

Oleh:

Bning Samudera Hakim<sup>1</sup>, Hariyanto<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze the presence and regulation of notary formalities in the making of the GMS deed electronically carried out in Sleman Regency as well as its implementation, based on the Notary Position Law Number 2 of 2014, Limited Liability Company Law Number 40 of 2007.

The type of research used is normative-empirical research, a combination of 2 types of research models in which this research examines the regulations, implementation, and implementation of positive legal provisions factually that occur in society. The data collection method used in this research is direct research or field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data.

As a result of the research, written arrangements regarding the presence of a notary in the implementation of an electronic GMS for a closed company have not been further regulated in the Limited Liability Company Law. The implementation of the electronic GMS implementation system in Sleman Regency has no regulations from the organization or the supervisory board regarding the implementation of the electronic GMS. In order not to conflict with the law, the company can make a circular decision or make a deed of meeting statement. In terms of implementation, the electronic GMS is indeed more easier for notaries in carrying out their duties, but it will be even more effective if it is accompanied by clear and precise regulations so as not to conflict with the Notary Position Law and the Limited Liability Company Law.

**Keywords: General Meeting of Shareholders (GMS), Notary, Electronic**

---

<sup>1</sup> Srontakan, Argomulyo, Bantul, D.I Yogyakarta

<sup>2</sup> Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, D.I. Yogyakarta